

TESIS

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN SEBAGAI TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYIMPANGAN BAHAN
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Kasus : Mahkamah Agung No. 877
K/Pid.Sus/2014)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

SRIYATUN SIH WIDODO

NIM : 201420251022

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyimpangan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus: Mahkamah Agung Nomor 877.K/Pid.Sus/2014).

Nama Mahasiswa : Sriyatun Sih Widodo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420251022

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Februari 2018

Jakarta, Februari 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

NIDN : 0311026802

Penguji I

: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Penguji II

: Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN : -

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., MM., MH
NIP: 1401175

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyimpangan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus: Mahkamah Agung Nomor 877.K/Pid.Sus/2014).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta,

Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Sriyatun Sih Widodo
201420251022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Sebagai
Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus
Penyimpangan Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi (Studi Kasus: Mahkamah Agung
Nomor 877.K/Pid.Sus/2014).

Nama Mahasiswa : Sriyatun Sih Widodo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420251022

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

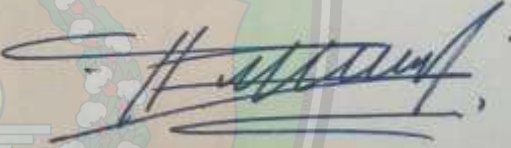
Jakarta, Februari 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. H.M. Hamafi Darwis, SH., MM
NIDN: 0323015604


Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN : 0311026802

BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : SRIYATUN SIH WIDODO

NPM : 201420251022

Angkatan : 12 (dua belas)

Temp. Tgl.Lahir : WONOGIRI, 21 JUNI 1975

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Penasehat Akademik :

Judul Tesis : " PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
KASUS PENYIMPANGAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI (Studi Kasus : Mahkamah Agung No. 877
K/Pid.Sus/2014) "

Pembimbing I : Dr. R.M. PANGGABEAN, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. BOY NURDIN, S.H., M.H.

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri
dan saya bertanggungjawab secara akademis atas apa yang saya tulis.

Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Tesis.

Bekasi, 5 Januari, 2018

Hormat Saya,



SRIYATUN SIH WIDODO
NPM: 201420251022

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : SRIYATUN SIH WIDODO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420251022

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis

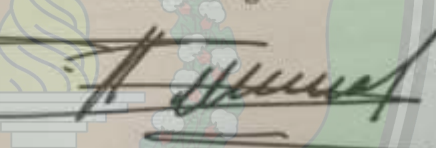
**PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN SEBAGAI
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYIMPANGAN
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI**

(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pidsus/2014)

Pembimbing I


Dr. R.M. Panggabean, S.H., M.H

Pembimbing II


Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

NIP : 0316077604

ABSTRAK

Sriyatun Sih Widodo, NPM 201420251022, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyimpangan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus : Mahkamah Agung No. 877.K/Pid.Sus/2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Menjelaskan aspek hukum tentang pendistribusian BBM bersubsidi berdasarkan jenis kegiatan usaha di Indonesia dan menjelaskan penegakkan hukum atas tindak pidana penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan dbahan hukum dilakukan melalui wawancara terhadap sumbernya yaitu bapak LF.Lumban Toruan, Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini antara lain: 1) Memberikan pemahaman mengenai mempergunakan BBM bersubsidi dalam jenis usaha pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. (2) Memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana atas organ jabatan akibat suatu kebijakan perusahaan mempergunakan BBM bersubsidi tanpa izin. (3) Menjelaskan jangkauan pertanggungjawaban pidana atas organ jabatan akibat suatu kebijakan perusahaan mempergunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin. (4) Memberikan informasi kepada pelaku usaha yang mempergunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan usahanya agar memperhatikan izin penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Bagi Pemerintah, untuk lebih memperjelas dan menegakkan aturan dan ketetapan khususnya bagi penggunaan kegiatan usaha hilir yang mempergunakan bahan bakar bersubsidi agar kegiatan usaha yang juga mengenai pelayanan publik dapat juga memperoleh kesempatan untuk mempergunakan bahan bakar minyak bersubsidi untuk keringanan usahanya. Namun untuk memperjelas kembali bagaimana profit dari usaha berbasis pelayanan publik tersebut, maka Pemerintah dapat meminta laporan atas keuntungan yang diperoleh Perusahaan agar penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tersebut tepat sasaran. Bagi Perusahaan berbasis pelayanan umum, bilamana ingin menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi harus mengetahui benar apakah dalam peraturan perundang-undangan bahwa usaha pelayanan publik tersebut diizinkan atau belum, dan bilamana belum maka dapat mengajukan kepada instansi Pemerintah terkait untuk memperoleh izin dalam mempergunakan dan menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Jabatan dan Tindak Pidana Korupsi
Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

ABSTRACT

Sriyatun Sih Widodo, NPM 201420251022, Abuse of Authority of Position as a Crime of Corruption in the Case of Distribution of Subsidized Fuel Oil (Case Study: Supreme Court No. 877.K / Pid.Sus / 2014

This study aims to know and understand Describe the legal aspects of the distribution of subsidized fuel based on the type of business activities in Indonesia and explains the law enforcement of the criminal petrol storage (BBM) without permission.

This research is an empirical law research, the technique of collecting dbahan of law is done through interview to the source that is father LF.Lumban Toruan, Library Studies, that is by collecting various documents in the form of primary law material and secondary law material and tertiary law material.

The results of this study include: 1) Provide an understanding of the use of subsidized fuel in the type of waste management business under the provisions of Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural gas jo. Presidential Regulation no. 15 Year 2012 About Retail Prices and Consumer Users of Certain Petroleum Fuel Type. (2) Providing knowledge of criminal responsibility for the organ of office due to a company policy using subsidized fuel without permission. (3) Describes the extent of criminal responsibility for the organ of office as a result of a company's policy of using unlicensed subsidized fuel oil (BBM). (4) Providing information to business actors using Fuel Oil in their business activities in order to pay attention to the permit for the use of subsidized Fuel Oil (BBM) as stipulated in Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Natural Gas jo. Presidential Regulation no. 15 Year 2012 About Retail Prices and Consumer Users of Certain Fuel Type of Oil.

For the Government, to further clarify and uphold the rules and provisions specifically for the use of downstream business activities that use subsidized fuel for business activities that are also about public services may also have the opportunity to use subsidized fuel oil for its business relief. But to clarify how the profit from such a public service-based business, the Government may request a report on the Company's profits for the distribution of subsidized fuel is targeted. For a public utility-based company, if wishing to use subsidized fuel, it is necessary to know whether or not in the legislation that the public service business is permitted or not, and where applicable to the relevant government agencies to obtain permits in the use and storage of fuel subsidized oil.

Keywords : Abuse of Possibilty and Criminal Act in Case of Fuel Oils

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir dari program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul **“PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYIMPANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pid.Sus/2014)**

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H.,M.M selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Prof. I. Made Widnyana, S.H., M.H. selaku Kaprodi Pascasarjana magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Brigjend. (Purn) Dr. R.M. Panggabean, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.H. Boy Nurdin, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH.,MM
5. Seluruh Dosen/Staff Pengajar dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Bapak Dr. M. Sianturi, S.H,M.H,M.M selaku Ketua LBH ASPI (Asosiasi Sinar Pers Indonesia), Ketua LAW FIRM Dr. M. Sianturi, S.H.,M.H.,M.M yang sudah memberikan kesempatan untuk penulis belajar, bekerja, memberikan dukungan, nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;

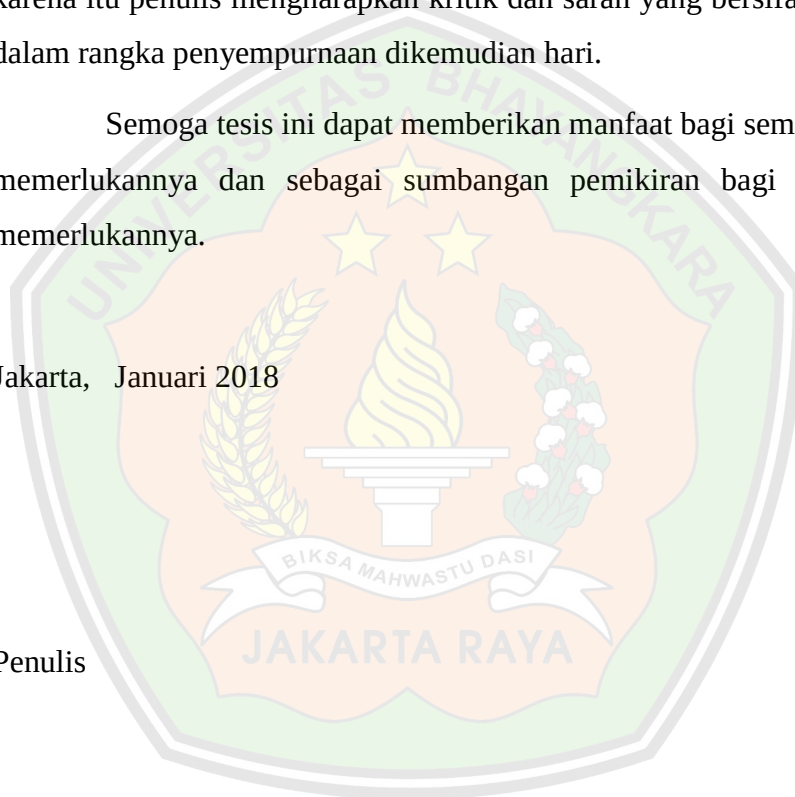
7. Seluruh teman-teman seperjuangan program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Suami dan anak-anakku terkasih, orang tua dan seluruh keluarga besarku yang sudah memberikan doa, kasih sayang, dukungan sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini;

Penulis menyadari bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, tesis ini masih banyak yang harus disempurnakan lagi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan dikemudian hari.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dan sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang memerlukannya.

Jakarta, Januari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Kerangka Teoritis	7
1.5. Kerangka Konseptual	26
1.6 . Kerangka Pemikiran (<i>Frame of Mind</i>)	33
1.7. Metode Penelitian	34
1.7.1. Spesifikasi Penelitian	34
1.7.2. Metode Pendekatan	34
1.8. Teknik Pengumpulan Data	35
1.9. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA	39
2.1. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Korporasi	39
2.1.1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..	44
2.1.2. Macam Subjek Dalam Hukum Pidana	48
2.1.3. Model – model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	52
2.1.4. Pemisahan Tanggung Jawab Selaku Korporasi & Selaku Organ	58

2.2.	Kajian Subjek Perseroan Terbatas Terhadap Sudut <i>Piercing The Corporate Veil</i>	61
2.3.	Kebijakan BBM Bersubsidi di Indonesia	70
2.3.1.	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	72
2.3.2.	Penyimpanan BBM	73
2.3.3.	Pengangkutan BBM	74
2.3.4.	Jenis Kegiatan Usaha yang Diperbolehkan Menggunakan BBM Bersubsidi	75
BAB III	IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 1298/PID.B/2012/PN.BKS.Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 877.K/PID.SUS/2014	77
3.1.	Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1298/Pid.B/2012/PN.Bks.....	80
3.2.	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 877.K/PID.SUS/2014.....	81
3.3.	Adanya Bukti Bukti Baru	83
3.4.	Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali	86
3.5.	Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83.PK/Pid.Sus/2016	86
BAB IV	ANALISIS ALASAN PERBEDAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 1298/PID.B/PN.BKS Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 877.K/PID.SUS/2014	88
4.1	Kedudukan BBM Bersubsidi Sebagai Kekayaan Negara	88
4.2.	Kedudukan Pasal 23 Ayat 3 Undang- Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagai Suatu Perbuatan Pidana	94
4.3	Kedudukan Perusahaan dan Organ Perusahaan Terhadap Perbuatan Pidana	98

BAB V	PENUTUP	111
	5.1. Kesimpulan	111
	5.2. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA		114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

